DAFTAR ISI

JURNAL SIDANG MPR-RI

EDITORIAL **Hal.**

- Siapakah Memimpin MPR..... 2.

LAPORAN UTAMA

- Pemilihan Ketua MPR RI Periode 2009-2014 Adu Lobi dan Strategi..... 3.

LIPUTAN

- Pimpinan MPR Mengembalikan Mobil Negara..... 4.
- 20% Gaji Anggota dipotong untuk Korban Gempa..... 5.
- Anggota DPR dan DPD Peduli Gempa..... 5.
- Taufik Kiemas " Saya Mantap, Maju Terus Menjadi Ketua MPR..... 6.
- Pelantikan Anggota MPR/DPR/DPD Tanpa Kehadiran Presiden 7.
- Rieke Diah Pitaloka Beban berat Menanti..... 7.
- Mudaffar Syah: Terus Perjuangkan Hak DPD..... 8.
- Hidayat Nur Wahid Sebagi Kader Partai Saya Siap Maju..... 8.
- Abdul Wahid Petani Tebu Jadi Anggota MPR..... 9.
- Percha Leampuri Anggota DPD Termuda..... 10.
- Rachel Maryam Siap Jalankan Tugas Di Parlemen..... 11.

SERBA SERBI

- Bingung Cari Ruang Rapat..... 12.
- Poppy Dharsono: Buat Batik Murah..... 12.
- Anggota Baru Diwarnai Kebingungan..... 12.
- Gedung MPR Jadi Ajang Wisata Dadakan..... 13.

TOKOH HARI INI

- Mudaffar Syah "Keseleo" Lidah..... 14.
- Marzuki Alie Dihinggapi Penyakit Grogi..... 14.

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI, **PENANGGUNG JAWAB** DR. C. Rahimullah, SH., M.Si, **PEMIMPIN UMUM** Drs. Eddie Siregar, M.Si **PEMIMPIN REDAKSI** M. Rizal, **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Yana Indrawan **REDAKTUR PELAKSANA** Elis Murniaty, Suratno **KOORDINATOR REPORTASE** Rharas Esthining Palupi, Adriansyah, **REDAKTUR FOTO** Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto **REPORTER** Euis Karmilah, Budi Muliawan, Rosando, Sopiah, Tengku Novan Muda Mulya, Tri Hastuti, Rudi M. Gultom, Jaka Sindu, Anggi Widia P, Suwarni, Bayu Setiadi, Suci Ati, Muammil Rokhily, Sugeng Irianto, Nita Juwita, Dian Arivani **FOTOGRAFER** Ari Soeprapto, Sugeng, Teddy Agusman, Wira, Eka Hindra Sasmita, Supardy, Iwan, Agung Sulistiono **PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI** Syamsul Bahri **KOORDINATOR DISTRIBUSI** Elly Triani **STAF DISTRIBUSI** Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani **SEKRETARIS REDAKSI** Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih, Fatmawati, Yenita Revi **TIM AHLI** Syahril Chili, Johni Yasrul, M. Husen, Rini S. Danudjaja, Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto, Iman Firdaus, Derry Irawan, Mustafa Helmy, Budi Sucahyono, Nurul Huda, Mauludi Rachman, Rianzi Gautama. **ALAMAT REDAKSI** Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, JakartaTelp. (021) 57895050, 57895051, 57895237, 57895238 Fax. (021) 57895051, 57895237

Siapakah Memimpin MPR

Hari-hari ini rakyat dan bangsa Indonesia tengah menunggu, siapa gerangan yang akan memimpin MPR, setelah DPR dan DPD. Sebab, bagaimanapun juga, meski MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, lembaga itu tetap menjadi perwujudan pengerucutan jabatan gabungan antara anggota DPR dan DPD. Nama-nama Hidayat Nur Wahid, Taufik Kiemas, dan Ginandjar Kartasasmita disebut-sebut sebagai calon kuat ketua MPR. Sementara di posisi wakil, muncul nama Hajriyanto Y. Tohari (Golkar) dan Lukman Hakim Saifuddin (PPP). Dari kubu DPD yang tampaknya berharap di posisi itu adalah H.M. Aksa Mahmud (Sulsel) dan GKR Hemas (DIY).

Memang, semula -selain DPD- bisa diskenariokan posisi di MPR dengan 'permainan' partai-partai besar. Misalnya, Taufik Kiemas yang didukung PDI-P dan Partai Demokrat. UU Nomor 27 Tahun 2009 menetapkan bahwa ketua haruslah dari unsur DPR. Namun dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hari Rabu (30/9) lalu, skenario ini harus diubah dengan melibatkan bintang-bintang baru, antara lain dengan munculnya nama Ginandjar, dan bahkan mungkin akan muncul nama lain.

Adalah lima anggota DPD: Wahidin Ismail (Papua Barat), Marhany Victor Poly Pua (Sulut), Sri Kadarwati (Kalbar), KH Sofyan Yahya (Jabar), dan Intsiawati Ayus (Riau) yang mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 27 tahun 2009. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa yang menjadi ketua MPR adalah dari unsur MPR. Pasal itu dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 14 ayat (1) itu berbunyi, "Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri dari anggota 2 (dua orang) wakil ketua dari anggota DPR dan dua orang wakil ketua berasal dari anggota DPD". Majelis hakim konstitusi menyatakan Pasal 14 Ayat (1) sepanjang menyangkut frasa "yang berasal dari anggota DPR" dan frasa "yang terdiri atas dua orang wakil ketua berasal dari DPR dan dua orang dari DPD. "Serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 27 tahun 2009, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," bunyi putusan itu.

Hakim konstitusi berpendapat pada hakikatnya, kedudukan, hak dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara atau sederajat. Hakim juga berpendapat bahwa MPR sebagai lembaga negara yang merupakan organ konstitusi dengan enam kewenangannya, sudah sewajarnya apabila pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR sendiri dalam forum persidangan MPR. Siapa pun anggota MPR, punya hak dipilih dan memilih.

Putusan MK ini memang ditakutkan akan membuat perebutan pimpinan antara DPD dan DPR dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Namun, harus difahami, bahwa tuntutan lima anggota DPD itu semata-mata menuntut hak yang sama dan mengoreksi adanya pasal yang diskriminatif yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan HAM.

Dengan demikian hasil pemilihan MPR akan ideal dan adil karena tidak menciderai hak asasi anggota DPD untuk menjadi ketua MPR. Walaupun harus disadari, secara matematis, ketua MPR akan dijabat unsur DPR, melihat jumlah mereka yang 4 kali lebih besar itu. Tapi, isyarat putusan MK itu bisa jadi, jika kemudian ada anggota DPD yang memiliki kelebihan dan dianggap layak memimpin MPR, tak ada salahnya DPR ikut mendukungnya dengan ikhlas. (MH)

Pemilihan Ketua MPR RI Periode 2009-2014

Adu Lobi dan Strategi

Jurnal MPR (02/10). Menjelang detik-detik pemilihan Ketua MPR RI Periode 2009-2014, geliat dan lobi-lobi antarpartai semakin menggeliat. Masing-masing partai menyusun tim suksesnya agar kadernya berhasil menduduki jabatan itu. Lobi-lobi pun sudah dan akan digalang sampai mereka benar-benar mendukung secara penuh. Setidaknya ada 5 nama calon Ketua MPR yang hendak bertarung dalam bursa calon Ketua MPR yakni Taufiq Keimas dari PDIP, Hajriyanto Y. Thohari dari Partai Golkar, Lukman Hakiem Saifuddin dari PPP, Hidayat Nurwahid dari PKS, dan Ginandjar Kartasasmita dari DPD.

"Ya kita sudah melakukan pertemuan dan mensosialisasikan ke partai-partai lain untuk kemudian menyamakan pandangan siapa yang terbaik untuk dipilih menjadi Ketua MPR," ujar Lukman Hakiem Saifuddin ketika ditanya Jurnal Majelis selepas pelantikan anggota DPR dan DPD. Partai berlambang Kabah itu mencalonkan Lukman secara resmi setelah keputusan itu diambil dalam rapat pleno Pengurus Harian) DPP PPP yang dipimpin langsung oleh Ketua umum PPP Suryadharma Ali, dua hari lalu. Menurut Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy, Lukman diberi amanah secara resmi dari partai untuk maju sebagai calon Ketua MPR karena dinilai memiliki pengalaman dan kecakapan yang tepat untuk menduduki kursi pimpinan MPR.

Pihak PDIP pun demikian, menurut Taufiq Keimas lobi-lobi ke partai lain sudah dilakukan. "Semua proses dan persiapan untuk maju menjadi ketua MPR sudah kami lakukan semua," ujarnya. Selama sidang-sidang yang dilakukan oleh DPR maupun MPR kemarin-kemarin, suami Megawati Soekarno Putri itu memang rajin hadir. Hal itu merupakan bagian dari sosialisasi akan keseriusan dirinya untuk maju sebagai calon ketua MPR. "Saya sangat mantap dan maju terus menjadi Ketua MPR RI. Insya Allah semuanya mendukung, kalau saya tidak optimis, saya tidak bakal datang ke sini (Gedung Nusantara)," kata Taufiq Kiemas.

Pihak PDIP ngotot untuk memperjuangkan Taufiq Keimas, menurut Sekjen PDIP Pramono Anung dikarenakan ia adalah figur yang dapat memberikan penjabaran tentang prinsip kenegaraan dan kebangsaan yaitu UUD NRI 1945 dan Pancasila sehingga mampu menjalankan amanat konstitusi negara.

Sebagai partai yang juga berkeinginan secara kuat agar kadernya tetap mempertahankan sebagai Ketua MPR, PKS pun melakukan hal yang sama. Dikatakan oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring, PKS sedang melakukan lobi-lobi dengan partai koalisi lainnya. "Saya mengajak partai koalisi untuk tetap melakukan koalisi. Karena kita sudah melakukan kerjasama sejak di pemilihan presiden dan dilanjutkan di parlemen. Ini sudah ada kontrak hitam di atas putih," katanya. Bila hal itu benar terjadi maka lebih dari 50% suara ada di tangan.

Klaim mengklaim dukungan pun muncul, seperti dikatakan bahwa PDIP telah didukung secara penuh oleh Partai Demokrat, namun adanya klaim itu dibantah oleh Tifatul. Menurutnya dukungan itu sifatnya masih pribadi belum secara institusi. "Saya sudah konfirmasi kepada Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dan Sekjen Marzuki Alie, bahwa belum ada keputusan resmi Partai Demokrat," ujarnya.

Bantahan dari Tifatul itu sepertinya benar, sebab berdasarkan apa yang dikatakan oleh Lukman Hakiem Syaifuddin bahwa bila pemilihan Ketua MPR dengan sistem paket, kemungkinan akan muncul 2 paket, yakni paket yang menjagokan Taufiq Kiemas, dan paket yang mengusung Hidayat Nurwahid sebagai ketua MPR. "Paket Taufiq Keimas didukung oleh PPP, Golkar, PKB, dan DPD," ujarnya.

Adanya lobi-lobi politik ini menurut anggota DPD terpilih dari Nangroe Aceh Darussalam, Dr. Achmad Farhan Hamid, sebagai langkah biasa dalam dunia politik, namun bila hal itu dilakukan secara intensif membuat saat pemilihan ketua MPR menjadi tidak seru lagi sebab semuanya sudah selesai di tingkat lobi. "Kita sudah bisa meramalkan nama-nama tokoh yang kemungkinan muncul adalah dari DPR, walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman dari DPD bisa menjadi Ketua MPR," ujar pria mantan anggota Pansus RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu. (Ardi Winangun/Budi. S/Derry/Huda)

Pimpinan MPR Periode 2004-2009 Mengembalikan Mobil Negara

Jurnal MPR (02/10). Ketika terpilih sebagai pimpinan MPR RI Periode 2004-2009, Paket B yang terdiri dari Ketua Hidayat Nur Wahid sebagai ketua, dan A. M. Fatwa, M. Aksa Mahmud, serta BRA Mooryati Sudibyo sebagai Wakil Ketua MPR sepakat menolak fasilitas mobil mewah jenis Volvo. Alasan mereka menolak mobil buatan Eropa itu untuk menunjukan agar MPR dapat meraih kepercayaan dari rakyat.

Selain itu, penolakan juga untuk menunjukan dan menepis isu kalau orang berebut menjadi Ketua MPR hanya untuk menambah fasilitas menginap di hotel, meraup uang saku, dan menghabiskan anggaran negara. "Semua langkah menolak mobil volvo dan kemewahan yang lain didukung oleh semua pimpinan MPR terpilih," ujarnya.

Selepas masa bakti MPR Periode 2004-2009 berakhir pada 1 Oktober 2009, dan setelah acara pelantikan anggota DPR RI dan DPD RI Periode 2009-2014. Keempat pimpinan MPR Periode 2009-2014 secara seremonial bersama-sama mengembalikan mobil dinas, Toyota Camry, yang selama 5 tahun ini telah mendampingi mereka.

Toyota Camry dengan plat bernomor RI 5 yang digunakan oleh Hidayat Nur Wahid, RI 49 yang digunakan A. M. Fatwa, RI 50 yang digunakan oleh M. Aksa Mahmud, dan RI 51 yang digunakan oleh Mooryati Soedibyo pada siang itu dengan menyertakan kunci dan STNK diserahkan kembali kepada negara melalui Sesjen MPR Rahimullah. "Siang hari ini kami menyerahkan mobil ini kepada negara," ujarnya.

Setelah penyerahan mobil itu, Hidayat mengakui akan menggunakan mobil pribadi yang telah dimiliki. Menurutnya, bila seseorang sudah mengakhiri jabatannya kepala lembaga tinggi negara atau seseorang yang sudah difasilitasi negara maka ia berhak untuk mengembalikan semua fasilitas itu kepada negara. "Karena fasilitas ini sangat terkait dengan jabatannya, apabila dia sudah menjabat lagi maka fasilitas itu wajib dikembalikan," ujar Hidayat. Ini hendaknya diikuti pejabat yang lain.

Ketika ditanya oleh seorang wartawan tentang masih banyaknya kepala daerah atau anggota lembaga legeslastif yang belum menggembalikan mobil milik negara, Hidayat mengharapkan agar segera mengembalikan fasilitas itu agar tidak menimbulkan masalah. (Ardi Winangun/Rhs)

Amin Rais : Tidak Perlu Ada Ketua MPR RI

Polemik mengenai siapa yang akan menduduki posisi pimpinan MPR ternyata dipandang secara radikal oleh Mantan ketua MPR RI periode 1999 – 2004. Bahkan Amin Rais menilai keberadaan Ketua MPR tidak diperlukan lagi dan dihapuskan saja.

"Pimpinan MPR dihapuskan saja. Pimpinan MPR cukup dari pimpinan DPR dan DPD," ujarnya usai menghadiri pelantikan Anggota MPR/ DPR/ DPD di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (1/10).

Menurut ayah dari anggota periode 2009-2014, Pimpinan MPR adalah pimpinan DPR dan DPD, karena MPR merupakan sidang gabungan DPR dan DPD dimana masing-masing pimpinan sebagai *culture man*.

Di Amerika, amin menggambarkan, hanya ada senat (kamar atas) dan *house of representative* (kamar bawah). Kalau di Indonesia, kamar atas adalah DPD sedangkan kamar bawah adalah DPR. "

"Karena di Indonesia mau berbagi-bagi kue maka untuk memperbanyak kue terjadilah pimpinan MPR sebanyak 5 (lima) orang," katanya.

Kedepan Amin berharap Ketua MPR / DPR/DPD dapat melaksanakan tugas pokoknya dan menjalankan nilai-nilai demokrasi pengalaman masa lalu. "Saat ini perjalanan demokrasi sudah semakin

mantap dan perlu waspada terhadap tantangan global," tandasnya.

Tantangan global yang dimaksud adalah Indonesia harus bisa lepas dari adanya krisis pangan, energi, moral, kemanusiaan dan sosial lainnya. Apalagi Indonesia sebagai negara G 20 sangat diperlukan adanya team work (kerjasama) dari eksekutif maupun legislatif.(da/sw)

Amien Rais: "Tidak Ada yang Spektakuler"

Jurnal MPR (2/09). Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menilai kinerja MPR masa jabatan 2004-2009 sudah bagus. "Saya nilai bagus. Karena MPR sudah bekerja dengan tugas dan wewenangnya," ujar Amien kepada Jurnal Sidang MPR usai pengambilan sumpah anggota DPR periode 2009-2014 di Gedung MPR/DPR, Kamis (1/10).

Menurut Ketua MPR Periode 1999-2004 itu, memang tidak banyak yang bisa dilaporkan pimpinan MPR. "Karena selama lima tahun, tidak terlalu banyak yang dikerjakan. Tidak ada badan pekerja. Jadi tidak hal-hal yang spektakuler," kata Amien.

Untuk MPR Periode 2009-2014, lanjutnya, tergantung pada apakah ada usulan perubahan UUD atau tidak. "Kalau tidak ada usulan perubahan UUD, maka MPR akan tetap seperti ini lagi. Sehingga MPR lebih banyak simbolik. Sedangkan untuk kembali lagi menjadi lembaga tertinggi seperti dulu pun sudah tidak mungkin. Karena sekarang kekuasaan sudah dikembalikan kepada rakyat," jelasnya.

Ketika menjadi Ketua MPR pada waktu lalu, Amien Rais sempat menantang anggota MPR untuk makan nasi bungkus setiap mengadakan sidang. Namun, tantangan ini dianggap terlalu mengada-ada. "Waktu itu saya lihat ada kesan perhelatan sidang umum MPR hanya menghamburkan uang. Lalu, saya tantang bagaimana kalau anggota MPR makanya nasi bungkus saja," ungkap Amien. Kalau setiap sidang hanya makan nasi bungkus, tambah Amien, maka rakyat akan bersimpati.(Derry Irawan/Budi Sucahyo)

Amien Rais Minta 20% Gaji untuk Korban Bencana

Jurnal MPR (02/10). Terkait dengan gempa di Sumatera Barat hari Rabo, 30 September kemarin, mantan Ketua MPR RI Dr. Amien Rais sangat prihatin, terutama jika dikaitkan pelantikan anggota MPR yang super mewah.

"Musibah gempa itu sangat menimbulkan kepedihan dan kesengsaraan. Sebagai anak bangsa yang peduli saudaranya cara yang paling simpatik alangkah baiknya ada komitmen dari seluruh anggota DPR RI gaji pertama mereka dipotong 20%, seperlima atau dalam bahasa agamanya *khumus* untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di sana,"kata Amien Rais, di MPR, Kamis, 1 Oktober kemarin.

Tahun 1980-an, Amin Rais pernah melontarkan pemikiran zakat khumus untuk kalangan eksekutif yang bergaji tinggi. Amin Rais mengambil analog dengan penemuan tambang (ma'din) yang zakatnya 20% alias khumus. Namun, karena banyaknya penentang ide Amin Rais ini tenggelam. Konsep khusmus juga dikenal di Iran yang bermazhab Syiah.(Derry Irawan/Budi Sucahyo)

20% Gaji Anggota Dipotong untuk Korban Gempa Sumbar

Jurnal MPR (02/10). Bencana alam gempa berkekuatan 7,6 skala richter telah menghantam Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Kepedihan, kesengsaraan dan keprihatinan sangat dirasakan sebagai saudara sebangsa. Bagi anggota DPR yang baru dilantik disarankan mantan Ketua MPR RI Amin Rais untuk menyisihkan 20% gajinya guna memperoleh simpatik dari masyarakat.

"Cara yang paling simpatik, alangkah baiknya,diantara semua fraksi bahwa Gaji mereka itu dipotong 20persen (Humus dalam bahasa Agama) guna meringankan beban bencana disana. Tidak skedar slogan-slogan, atau petatah-petitih," ujarnya usai pelantikan anggota MPR/DPR/ DPD RI di Gedung Nusantara, Kamis (1/10).

Ia menyarankan supaya Ketua Fraksi berkumpul, guna mewujudkan niatnya. Hal itu supaya beban penderitaan masyarakat Sumatera Barat sedikit berkurang dan DPR sekaligus dapat simpati masyarakat.

"Tapi kalau melepas gaji pertama saja berat, itu namanya kelewatan," katanya.

Selama ini DPR memang sudah lama mendapat sorotan bahwa kurang peka dan lain-lain, maka Amin mengusulkan semua fraksi tanpa terkecuali mewajibkan semua gaji anggota dipotong 20 persen.

"Kalau 20 persen dikali dengan 560 jumlah anggota, saya rasa cukup banyak," katanya.

Dulu ketika dirinya menjabat Ketua MPR, setiap sidang tahunan selalu dinilai pemborosan, lalu ia tantang bagaimana jika setiap anggota MPR makan nasi bungkus ? Ternyata dinilai terlalu mengada-ada juga.

Padahal lanjutnya, kehidupan seorang pemimpin yang tidak terlalu jauh dengan kehidupan rakyat yang dipimpinnya justru akan semakin dipercaya. Sebaliknya jika kehidupan pemimpin terlalu surgawi sementara kehidupan ekonomi rakyat yang dipimpinnya *senin-kamis* akan menimbulkan ketidakpuasan sosial.

"Yang lebih penting lagi adalah menghilangkan rasa ketidakpercayaan kepada pemimpin," ujarnya.

Senada, Anggota dari Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana sangat mendukung terhadap usulan yang diungkapkan Mantan Ketua MPR RI tersebut. "Kemungkinan kami dari Fraksi Partai Demokrat, akan menghimpun dana guna memberikan santunan untuk korban gempa yang terjadi di Padang," ujarnya.

Secara pribadi Sutan mendukung usulan Mantan Ketua MPR, Amin Rais (pemotongan 20persen gaji pertama DPR periode 2009-2014), namun ia belum mengetahui keinginan Anggota yang lain.

"Karenanya masalah ini akan dibicarakan terlebih dahulu," katanya usai pelantikan Anggota DPR dan DPD terpilih periode 2009-2014. (da/sw)

Anggota DPR Dan DPD Peduli Gempa SUMBAR

Jurnal MPR (02/10). Suasana pelantikan anggota DPR RI dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara Senayan Jakarta, Kamis (1/10), diwarnai suasana keprihatinan dan kepedulian atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Padang Sumatera Barat.

Ketua DPR sementara, Marzuki Alie saat membuka acara Pengucapan Sumpah/Janji anggota DPR periode 2009 – 2014 setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dikumandangkan dan di dalam sesi acara mengheningkan cipta menyelipkan penyampaian keprihatinan atas terjadinya musibah gempa bumi yang terjadi di Padang.

Ketua DPR sementara mengharapkan, semoga masyarakat bisa tabah menerima musibah ini dan tak lupa dia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Musibah ini diharapkan dapat diambil hikmahnya dan kita semua berharap tidak terjadi lagi musibah serupa di bumi minang itu.

Sementara itu, sebanyak 14 anggota DPR asal Sumatera Barat memutuskan untuk pulang kampung, guna melihat tanah kelahiran serta keluarga yang tertimpa musibah gempa.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Irwan Prayitno yang asal Padang seusai mengikuti acara pelantikan DPR mengatakan, rencana pulang kampung sudah diputuskan bersama teman-temannya Rabu malam.

Irwan mengatakan, 14 anggota DPR tersebut terdiri dari berbagai partai politik, mereka sangat bersimpati atas terjadinya musibah itu. "Untuk itu kami juga akan menyumbangkan penghasilan dan gaji pertama kami untuk korban gempa.

Keprihatinan serupa juga disampaikan anggota termuda DPD RI Percha Leanpuri, walaupun dia mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan, tapi dia tergerak untuk

ikut menyumbangkan sebagian gajinya untuk korban gempa di Padang.

Dia mengatakan, DPD sendiri setiap bulannya menghimpun sumbangan untuk membantu korban-korban bencana di tanah air. Dengan musibah gempa ini dia berharap, para anggota DPD tergerak untuk menyumbangkan sebagian gajinya untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua MPR RI Amin Rais yang juga menghadiri acara pelantikan mengusulkan gaji DPR perdana dipotong 20% untuk menyumbang korban gempa Padang.

Usulan Amin Rais tersebut diharapkan ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR. Sebab citra DPR yang terpuruk bisa terangkat dengan niat baik mereka untuk menyumbangkan gaji perdananya. "Kalau menyumbangkan 20% gaji pertama saja berat, itu berarti memang sudah sangat kelewatan, DPR sudah terlalu lama disorot kurang peka dan citranya menurun," kata Amin yang pernah memimpin MPR selama lima tahun.

Senada dengan itu, Ahmad Mumtaz Raiz putra Amin Rais yang juga ikut dilantik menjadi anggota DPR periode 2009-2014 mengatakan, dia sangat sependapat dengan usulan ayahnya. "Saya setuju sekali jika sebagian gaji saya dipotong untuk korban gempa, mudah-mudahan hal ini juga diikuti anggota DPR yang lain," katanya.

Gempa dengan kekuatan 7,6 pada skala richter melanda Sumatera Barat Rabu lalu yang meporakporandakan kota Padang, dan korban jiwa sudah mencapai 250 orang lebih dan diperkirakan masih banyak yang tertimbun puing-puing bangunan. (mp/tuti)

Pramono Anung Wibowo: Taufiq Kiemas Sudah Diputuskan Partai

Jurnal MPR (02/10). Perihal penunjukkan Taufiq Kiemas menjadi kandidat Ketua MPR RI, menurut Sekjen PDIP Pramono Anung, sudah diputuskan partai. Menurutnya ada beberapa sebab mengapa Kiemas didorong menjadi kandidat Ketua MPR RI. "Pak Taufiq yang kami dorong maju menjadi kandidat Ketua MPR RI karena beliau adalah figur yang dapat memberikan penjabaran tentang prinsip kenegaraan dan kebangsaan, yaitu UUD Indonesia dan ideologi Pancasila sehingga mampu menjalankan amanat konstitusi Negara,"jelas calon Ketua DPR RI ini.

Berbicara tentang arah mana seharusnya para anggota parlemen sekarang ini membawa nama sehingga bisa lebih harum di mata masyarakat, Pramono Anung menjelaskan bahwa DPR saat ini harus mampu memberikan pencitraan yang lebih baik, lebih kuat, lebih santun, lebih solid dan lebih terbuka kepada masyarakat.

"Karena bagaimanapun masyarakat meminta harapan yang sangat tinggi kepada dewan yang sekarang. Dan diharapkan kesalahan-kesalahan beberapa anggota DPR yang dahulu mudah-mudahan tidak akan terjadi kembali pada anggota DPR periode sekarang. "Ya semua kesalahan anggota DPR masa lalu jangan terjadi lagi seperti soal gratifikasi dan sebagainya yang marak dan masyarakat sudah mengetahuinya.

Ke depan, yang terpenting jangan sampai ada sesuatu yang masuk *grey area* yang menyangkut gratifikasi dan lainnya, sehingga segala sesuatunya diharapkan lebih terbuka,"ujar Pramono.

Pramono yakin DPR yang sekarang ini banyak anggota baru yang lebih segar dan lebih bugar dan mudah-mudahan kasus korupsi tidak akan terjadi lagi.(Derry Irawan)

Taufiq Kiemas: Saya Mantap, Maju Terus Menjadi Ketua MPR RI

Jurnal MPR (02/10). Usai acara perhelatan Upacara Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPR,DPD dan MPR Kamis (01/10) kemarin, *Jurnal MPR* langsung menguber kandidat kuat Ketua MPR RI ini. Dari keterangan yang didapat

Taufiq Kiemas benar-benar optimis untuk terus maju menjadi ketua MPR RI. "Saya sangat mantap dan maju terus menjadi Ketua MPR RI. Insya Allah semuanya mendukung, kalau saya tidak optimis, saya tidak bakal datang kesini," kata Taufiq Kiemas.

Mengenai lobi-lobi ke partai lainnya, Ketua Dewan Pembina DPP PDIP ini menjelaskan bahwa semua itu sudah dilakukan. Jadi semua usaha untuk mengarah ke arah MPR 1 sudah diupayakan dan sangat optimis terpilih. Lebih jauh Taufiq tidak gentar dengan sinyalemen akan banyaknya bertaburan kandidat untuk menduduki kursi orang nomor 1 MPR.

"Semua kandidat untuk menjadi Ketua MPR RI pastilah orang-orang baik dan berkualitas. Marilah kita melakukan proses ini dengan demokratis. Semua proses dan persiapan untuk maju menjadi ketua MPR RI sudah kami lakukan semua, tentram kita sekarang. PDIP selalu berpikiran positf. Jadi semua respon untuk saya positif," ujar Taufiq Kiemas.

Jurnal MPR pun menggoda Taufiq Kiemas dengan pertanyaan apakah nanti kami akan menemui anda di ruang pimpinan MPR RI?, "Okelah kita akan bertemu disana ya," jawab Taufiq Kiemas sambil tersenyum penuh optimis.(Derry Irawan)

Liputan H.Nudirman Munir,SH: Bekerja Maksimal di Bidang Hukum

Jurnal MPR (02/10). Sosok tinggi besar ini tak asing lagi dikalangan dunia peradilan. Profesinya sebagai seorang pengacara membawa dirinya melanglang buana di dunia peradilan Indonesia dan sangat menguasai dalam bidang hukum. Kini kiprahnya lebih besar dan luas lagi. Nudirman melenggang manis menjadi anggota MPR unsur DPR RI melalui Partai Golkar.

Jurnal MPR pun dengan sigap menghadangnya usai acara pelantikan dan memberondong dengan beberapa pertanyaan. Nudirman menjelaskan bahwa ia sangat bangga menjadi anggota DPR RI artinya kiprahnya akan semakin luas dan lebih tampak nyata di masyarakat. "Saya mengharapkan malah harusnya lebih banyak pengacara yang menjadi anggota DPR/MPR, karena kita ini (pengacara) tahu persis tentang lika-liku aturan Undang-Undang. Tapi bukannya saya mengatakan bahwa yang lain itu tidak bagus, yang lain juga bagus tapi jauh lebih bagus kalau banyak pengacara, karena sangat tahu persis bagaimana UU itu dan permasalahannya,"jelas Nudirman.

Nudirman menambahkan, selama ini para pakar hukum yang berkiprah di DPR RI periode lalu sudah maksimal melaksanakan tugasnya. Namun, ada beberapa yang belum maksimal. Tinggal pakar hukum sekarang yang meneruskan dan lebih menyempurnakannya.

"Saya rasa, khususnya masalah hukum seperti lika-liku mafia peradilan kurang begitu terungkap. Karena selama ini kurang atau terbatasnya yang berlatarbelakang pengacara di parlemen, kalaupun ada sifatnya hanya formalitas dan belum maksimal untuk menyentuh kearah sana. Saya berharap, khususnya kepada diri saya sendiri dan juga rekan-rakan yang lain untuk mengungkapkan permasalahan hukum selain mafia peradilan secara terang benderang," tambah Nudirman.

Nudirman akan mengusahakan sesuai kemampuan dan posisinya untuk membuat hukum menjadi panglima di negeri ini dan dijaga secara murni. Di lain sisi ada yang mengganjal di hati Nudirman. Banyak media massa yang terlalu biasa memvonis sesuatu secara tak logis. "Saya mendengar selentingan banyak anggota DPR muka baru tapi kelakuan lama. Menurut saya sudah vonis tanpa bukti. Saya insya Allah di komisi yang membidangi hukum. Llihatlah nanti kinerja kami-kami!"ujar Nudirman.(Derry Irawan)

Gayus Lumbun Janji Tegakkan Implementasi Hukum

Jurnal MPR (02/10). Dipercaya masyarakat untuk menjabat kembali sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, Gayus Lumbuun dari Fraksi PDIP berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di bidang hukum.

"Saya akan menegakkan hukum baik dalam sisi pembentukan maupun implementasinya karena Komisi III DPR bermitra dengan para penegak hukum," katanya jika ditempatkan kembali pada komisi yang sama usai pelantikan anggota MPR/ DPR/ DPD, Gd Nusantara Senayan, Kamis (01/10).

Dia berjanji tidak hanya dalam bidang legislatornya saja namun juga akan peduli di bidang pengawasan kepada pelaksanaan hasil perundang-undangan.

Terhadap penambahan Komisi dalam susunan DPR, Gayus menilai itu dikarenakan adanya pertambahan pergerakan masyarakat. "Kami memfokuskan kepada pembidangan maka perluasan komisi atau alat kelengkapan adalah langkah yang baik," ujarnya.

Pembagian anggota DPR setiap komisi nantinya akan dibagi secara proporsional. (da/sw)

Pelantikan Anggota MPR/DPR/ DPD Tanpa Kehadiran Presiden

Jurnal MPR (02/10). Menanggapi ketidakhadiran Presiden dalam pengambilan sumpah jabatan anggota MPR/ DPR/ DPD RI periode 2009-2014, menurut Anggota DPR/MPR Gayus Lumbun tidak menjadi suatu hal yang perlu dipersoalkan.

"Harus dimaklumi karena beliau memiliki berbagai tugas dan sudah diwakili oleh Wakil Presiden," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Demikian pula, ketika DPR berhalangan menghadiri acara kenegaraan untuk dapat dimaklumi. "Secara hukum eksekutif dan legislatif seimbang secara hukum," katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota dari Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana yang tidak mempersoalkan dengan ketidakhadiran Presiden dalam pengambilan sumpah jabatan anggota.

Ketidakhadiran Presiden RI pada acara pelantikan tidak mengurangi kemeriahan dan kebahagiaan para anggota MPR/DPR/ DPD dalam pelantikan. Acara berjalan sesuai prosedur hingga penandatanganan dari masing-masing anggota dan diakhiri dengan bersalaman antar anggota menandakan telah sah menjadi anggota. (da/sw)

Rieke Diah Pitaloka Beban Berat Menanti

Jurnal MPR (02/10). Terpilih sebagai anggota periode 2009-2014 bagi pemeran Oneng dalam sinetron "Bajai Bajuri" merupakan sebuah kerja berat. Meningat kondisi masyarakat Indonesia saat ini tengah berada dalam keadaan memprihatinkan akibat adanya bencana alam maupun sosial di berbagai daerah, seperti yang baru saja terjadi di Padang Pariaman.

Hal pertama yang akan dilakukan Rieke sebagai anggota DPR adalah berkomunikasi dengan partai. "Komuni-kasi itu penting sekali, karena kita tidak sendiri. Keberadaan kita sebagai anggota DPR merupakan petugas partai dari fraksi," ungkapnya usai pengambilan Sumpah/Janji Anggota MPR/ DPR/ DPD RI periode 2009-2014 di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (1/10).

Kedua, bagaimana membentuk sebuah Tim yang betul-betul bisa bekerja sama yang nanti bisa membantu dirinya bekerja. "Jaringan-jaringan yang ada di luar Parlemen mudah-mudahan masih mau membantu saya," tandasnya.

Ketika disinggung tentang kekhawa-tiran banyak kalangan pihak terkait kualitas keanggotaan sekarang, dengan tegas Rieke menjawab: "Kita buktikan dengan kerja," tegasnya.

Rieke berharap, partainya akan menempatkannya di Komisi yang membidangi masalah tenaga kerja. Ia mengaku fraksinya sudah mempunyai berbagai langkah konkret untuk membantu permasalahan tenaga kerja.

"Kondisi tenaga kerja masih sangat memprihatinkan, sehingga banyak hal harus dibenahi. Mulai dari peraturannya, pelaksanaan peraturannya. Yang sangat memprihatinkan adalah nasib tenaga kerja yang berada diluar negeri. Para buruh migran Indonesia.

"Kita akan concern sekali terhadap persoalan itu," janji anggota dari partai berlambang kelapa banteng ini.

Kepada rakyat yang telah memilihnya, Rieke mengaku tidak akan lupa diri meskipun ia tidak terlibat langsung namun perhatian terhadap mereka tetap akan diakomodir baik melalui staf, maupun jaringan-jaringan yang telah dibentuk, selalu akan bekerjasama dengan baik.

"Tanpa mereka kita tidak akan ada disini," ujarnya. (da/sw)

Ahmad Mumtaz Rais (F-PAN) : Kesuksesan Sang Ayah Justru Sebagai Cambuk Dalam Berkarya

Sebagai salah satu putra Mantan Ketua MPR RI, daerah pemilihan Jawa Tengah VIII, Cilacap, Banyumas, Ahmad Mumtaz Rais tidak gentar akan bayang-bayang kesuksesan ayahnya. Justru akan dijadikan cambuk dalam berkarya lebih baik. Dari jumlah suara 100ribu lebih yang memilih dirinya lebih dari 50 persen.

"Sangat siap saya, apa yang dikatakan imam politik kita, kami siap melaksanakan," tegasnya usai pelantikan dirinya sebagai anggota DPR RI, gedung Nusantara, kamis (1/10).

Menurut Mumtaz, Amin Rais tidak hanya berperan sebagai orangtua, sekaligus juga merupakan imam politik.

Lebih lanjut, Ia berjanji akan memperjuangkan Undang-Undang yang *Pro*-rakyat. Perjuangan Itu akunya telah ia persiapkan semenjak kecil, terlebih terlahir dikeluarga politisi. "Memang kehidupan politik sudah menjadi menu makanan sehari-hari," katanya.

Memang sudah menjadi cita-cita darinya, lambat atau cepat, ia akan terjun ke dunia politik. Dan ini adalah saatnya. "Sejak kecil saya memang ingin menjadi seorang politisi. Jadi saya tidak merasa rugi terjun didunia politik diusia muda. Justru itu kan menjadi berkah insyaallah," tegasnya.

Mengingat daerah pemilihannya (Dapil) cukup terpencil sehingga sosialisasi melalui teknologi kurang mengena. Sehingga untuk berhubungan dengan konstituen adalah

dengan mendatangi langsung kedaerah, bertemu dan tatap muka dengan mereka.

Adapun bidang yang akan diperjuangkan pria berkulit putih ini sama dengan ayahnya dibidang Ekonomi, sesuai dengan dispilin ilmu yang dimiliki. (da/sw)

Sutan Bhatoegana (F-PD) : Tidak Ada Lagi Pandangan Fraksi Saat Pengesahan RUU

Politisi dari partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengungkapkan akan banyak perubahan mendasar pada Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014.

Salah satu perubahan dimaksud, kata dia, akan menyikapi supaya tidak terjadi kebosanan dalam Sidang Paripurna, terutama saat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU), tidak perlu ada sesi pembacaan pandangan Fraksi. lagi

"Cukup Ketua Komisi atau Ketua Pansus saja dengan Pemerintah yang menyampaikan, lalu diputuskan, setuju. Tidak perlu semua fraksi menyampaikan pandangannya. Karena semua permasalahan sudah dibahas tuntas dalam Komisi atau Pansus, dan hasilnya sudah disetujui," tegas Sutan usai pelantikan anggota MPR/ DPR/ DPD, Gd Nusantara Senayan, Kamis (1/ 10).

"Kita harapkan jika sudah diputuskan di Komisi atau di Pansus, tidak perlu lagi ada yang berpidato di sidang paripurna. Paripurna itukan hanya seremonial saja," katanya menambahkan

Selain itu, masalah kehadiran juga masih akan dibahas. Ia berpendapat, tingkat kehadiran tetap minimal harus ada korumnya. "Korum itu penting, bisa diukur dari kehadiran pisik maupun jumlah tanda-tangan. Tapi lebih bagus kalau tanda tangan beserta orangnya ada," tandasnya

Terkait adanya wacana penambahan jumlah Komisi menjadi 15 Komisi dan 6 Badan di DPR yang dikemukakan Ketua Pansus perubahan Tata Tertib (Tatib) Darul Siska beberapa hari lalu, Sutan justru mempertanyakan landasan perubahan tersebut

"Apa alasannya sehingga harus diubah sebanyak itu," tanyanya

Menurut Sutan, dengan 11 Komisi saja para Menteri sudah sangat sibuk memenuhi panggilan rapat kerja di DPR. Sehingga dapat dibayangkan jika nantinya menjadi 15 Komisi.

"Para Menteri kapan kerjanya, hanya *muter-muter* saja rapat di DPR. Kalau sekarang, 11 Komisi masih ada jedah karena bergantian," kata Sutan

Politisi yang lelucon ini, mengatakan dirinya masih akan tetap berkiprah di Komisi bidang energi, mengingat Anggota DPR periode 2009-2014 banyak yang masih benar-benar baru, sehingga ia merasa khawatir jika dilepas sepenuhnya. "Masih perlu waktu. Bertahap," katanya

Namun Sutan optimis kepada 70persen Anggota yang baru, jika diberikan bahan yang baik, mulai dari langkah yang baik, insyaallah akan menjadi baik hasilnya.

"Insyaallah, saya optimis. Mudah-mudahan lebih baik dari yang lalu," ujarnya.

Sutan menyadari periode lalu, kinerja dibidang legislasi masih banyak yang kebobolan, hanya 60 persen yang mampu diselesaikan. Karena itu ia berharap periode sekarang akan lebih produktif dengan menambah hari untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), begitupun dibidang pengawasan akan semakin ditingkatkan. (sw/da)

Anggota Tertua DPD Mudaffar Syah: Terus Perjuangkan Hak DPD

Jurnal MPR (02/10). Ketua DPD Sementara Mudaffar Syah mengatakan, dirinya akan memperjuangkan hak DPD, khususnya dalam menjalankan fungsi *budget* dan legislasi pada periode ini. "Saya akan perjuangkan hak ini karena terlihat hak DPD dalam legislasi tentang daerah sering diganjal-ganjal oleh DPR," katanya seusai acara pelantikan anggota DPD RI, di Gedung Nusantara, (1/9).

Menurut Mudaffar, rakyat sekarang sudah cukup pintar melihat persoalan ini, karena itu DPR RI harus hati-hati ke depan. "Memang hubungan DPR-DPD kadang-kadang harmonis dan juga sebaliknya. DPR ingin bertahan dengan wewenangnya, sementara DPD berusaha mendapatkan hak konstitusionalnya," terangnya.

Dia menambahkan, persoalan itu bisa diselesaikan dengan pendekatan kepada DPR RI agar adanya keseimbangan wewenang diantara lembaga tersebut. "Jadi tidak usah ngotot-ngotot, biar berjalan saja,

karena banyak orang yang bicara demokrasi tetapi dia tidak mengetahui apa nilai demokrasi," paparnya.

Menyinggung keputusan MK yang memperbolehkan DPD mengajukan calon pimpinan MPR, dia menilai posisi ini sangat strategis dalam meningkatkan posisi dan peran DPD ke depannya.

"Posisi MPR sebagai pembuat UUD sangat strategis, karena dapat dimasukkan pasal mengenai peningkatan peran DPD yang menerangkan hak *budget* juga berada di DPD," katanya.

Dia menambahkan, hal tersebut harus menjadi tujuan dan tugas bersama dari DPD dalam meningkatkan peran DPD dalam amandemen UUD mendatang. (sugeng/mastur)

Hidayat Nur Wahid Sebagai Kader Partai Saya Siap Maju

Jurnal MPR (02/10). Setelah sempat berkelit ketika ditanya tentang pencalonan dirinya menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akhirnya Hidayat Nur Wahid menyatakan dirinya siap. "Saya sebagai kader partai siap. Sesuai dengan apa yang saya nyatakan kemarin,

saya akan menyelasaikan dulu masa tugas saya. Kalau saya sudah melaksanakan amanah yang diemban selama ini dengan baik, maka saya siap melaksanakan amanah berikutnya. Kalau partai mengamanatkan untuk menjadi ketua MPR, maka saya siap melakukakannya," katanya, usai Sidang MPR, Kamis (1/9) sore kemarin. Majunya Hidayat ini semakin meramaikan kandidat ketua MPR.

Pencalonan Hidayat sebagai ketua MPR periode 2009-20014 juga diakui oleh beberapa koleganya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring disela-sela pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan perwakilan Daerah (DPD) mengatakan bahwa PKS siap

mengusung Hidayat menjadi ketua MPR. "Kami dari fraksi melaksanakan amanat dari partai mendukung pencalonan Pak Hidayat Nurwahid. Yang kita lakukan adalah koordinasi," kata Tifatul

Sementara anggota PKS lainnya, Irwan Prayitno juga mengatakan hal senada. "Saya kira kami mencalonkan pak Hidayat sebagai ketua MPR. Untuk itu kami sedang melakukan konsolidasi di dalam maupun dengan partai-partai lainnya," ujarnya. Ditanya tentang kans Hidayat Nur Wahid kembali terpilih menjadi ketua MPR, Tifatul maupun Irwan menyatakan akan lebih banyak tantangan. "Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi semua bisa berbalik. Seluruhnya ketua MPR bisa dari DPR atau sebaliknya," kata Tifatul.Untuk itu PKS harus berkoalisi dengan partai lain, dan itu akan dibicarakan dengan tim.

Sebelumnya Dr Hidayat Nur Wahid belum memberikan jawaban perihal pencalonan dirinya kalau ditanya tentang maju atau tidaknya menjadi ketua MPR periode 2009-2014. Walaupun dari PKS banyak yang menjagokannya. "Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mencalonkan saya untuk kembali memimpin MPR," katanya.

Ditambahkannya, PKS mencalonkan dirinya sebagai calon ketua MPR mendatang sudah memperhitungkan secara matang. Bagi Hidayat setiap anggota parlemen memiliki hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Ia dikenal sebagai cendekiawan yang bergaya lembut. Sosoknya semakin dikenal setelah menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Dr. Nur Mahmudi Ismail. Pada pemilu 2004 Hidayat terpilih menjadi Ketua MPR 2004-2009. (Nurul Huda)

Abdul Wahid Petani Tebu Jadi Anggota MPR

Di kalangan petani tebu, nama Abdul Wachid tidak asing lagi. Pria asal Jepara, Jawa Tengah, itu adalah Ketua DPP APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) 2005-2010. APTRI di bawah kepemimpinannya, sangat vokal dan membela para petani tebu rakyat. Itu penting, sebab jumlah petani tebu mencapai 2 juta orang, dan bila ditambah dengan keluarganya bisa mencapai 8 juta orang.

Untuk lebih memperkuat perjuangannya membela kaum petani, Abdul Wahid terjun dalam dunia politik. Ia dipercaya oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Ia pun mendaftarkan diri sebagai calon legeslatif dari Partai Gerindra di Dapil II Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.

Untuk meraih suara agar bisa menghantarkan diri ke Senayan, tidak terlalu sulit bagi Abdul Wahid. Selain karena putra daerah, jauh-jauh hari dia sudah merakyat atau dekat dengan rakyat, terutama dengan para petani tebu. Dan, loloslah dia.

Ketika ditanya bagaimana rasanya menjadi anggota DPR/MPR Periode 2009-2014, dengan santai ia menjawab: "Saya kira sama saja, kalau dulu berjuang di luar pagar sekarang di dalam pagar."

Terpilih ia menjadi wakil rakyat, menurut Abdul Wahid, merupakan amanah. Untuk itu ia berkomitmen dan harus melaksanakan amanah itu dengan sebaiknya-baiknya.

Karena berjuang di dalam pagar, maka ia berkeinginan untuk bisa masuk dalam Komisi VI atau Komisi IV. Komisi VI pada periode kadang membuat kebijakan yang nyleneh, seperti soal kebijakan ekspor, impor, dan bea masuk. "Saya akan berusaha agar kebijakan itu tidak terulang, sebab di sini banyak bersliweran macam-macam," ujarnya tersenyum.(Ardi Winangun)

Berharap Terjalin Kerjasama Antarfraksi

Jurnal MPR (02/10). Sembilan fraksi di DPR berharap dapat bekerjasama dalam menjalankan tugas. Hal itu diungkap para juru bicara masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Sementara Marzuki Alie (F-PD) di dampingi Priyo Budi Santoso (F-PG) di ruang Rapat Paripurna DPR, Kamis (1/10).

Rapat Paripurna DPR RI kedua yang pertama kali dipimpin Pimpinan Semenetara DPR dalam agendanya setiap fraksi menyampaikan nama fraksi dan struktur pimpinannya.

Juru bicara F-Partai Demokrat (F-PD) dalam penjelasannya di hadapan Rapat Paripurna mengatakan, nama fraksi tersebut tidak berubah. Namun Ketua Fraksi yang semula di jabat Syarief Hasan, pada periode kali ini di jabat Anas Urbaningrum.

Fraksi Partai Golkar juga tetap menggunakan nama yang sama dengan periode sebelumnya. Ketua F-PG dijabat sementara Priyo Budi Santoso hingga Munas Partai Golkar di Pekanbaru.

Juru bicara F-PDI Perjuangan Panda Nababan dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Ketua Fraksinya tetap di jabat Tjahjo Kumolo, sekretaris Bambang Wuryanto dan Bendahara Olly Dondokambey.

F-PKS pada periode 2009-2014 dipimpin Mustafa Kamal. F-Partai Amanat Nasional atau F-PAN diketuai Asman Abnur. Asman ini pada periode 2004-2009 menjabat Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan.

Hasrul Azwar pada periode 2009-2014 menjadi Ketua F-Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Hasrul pada periode 2004-2009 menjabat sebagai Ketua Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial.

Marwan Ja'far pada periode 2009-2014 menjadi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Periode sebelumnya, fraksi ini menggunakan nama Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Sementara itu dua pendatang baru yaitu Fraksi Partai Gerindra (F-PG) dipimpin Wijono Harjanto dengan Sekretaris Fraksi dijabat Desmon J Mahesa. Fraksi Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) dipimpin Ahmad Fauzi. (bs)

Suasana Kekeluargaan Warnai Perpisahan DPR 2004-2009

Jurnal MPR (02/10). Suasana akrab dan penuh kekeluargaan mewarnai malam perpisahan Anggota DPR Periode 2004-2009. Di hari terakhir mengabdi sebagai wakil rakyat, suasana penuh kehangatan dapat dirasakan saat Anggota DPR saling menyapa dan berjabat tangan satu dengan lainnya. Kehangatan malam perpisahan tersebut semakin kental dengan hadirnya suami atau istri dari masing-masing Anggota DPR.

Malam perpisahan Anggota DPR Periode 2004-2009 berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR RI, Rabu (30/9). Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah undangan diantaranya Duta Besar dari beberapa negara sahabat.

Dalam sambutannya, Ketua DPR Agung Laksono menilai selama lima tahun, fungsi Dewan, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi berjalan cukup optimal. "Tiga fungsi Dewan sudah berjalan cukup optimal," katanya.

Menurut Agung, laporan kinerja Dewan selama lima tahun (2004-2009) telah dilaporkan dalam bentuk buku. Laporan tersebut diserahkan kepada seluruh Ketua Fraksi yang ada di DPR saat malam perpisahan.

Selain laporan kinerja Dewan selama lima tahun, Ketua DPR juga menyerahkan buku Laporan Tim Peningkatan Kinerja Dewan. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban politik DPR Periode 2004-2009," kata Agung.

Lebih jauh, Ketua DPR memberikan apresiasi atas kinerja seluruh Alat Kelengkapan Dewan dari Komisi I hingga Komisi XI dan Alat Kelengkapan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPR juga menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa bumi di Sumatera Barat. Dewan berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dengan skala 7,6 SR.

"Dewan berharap pemerintah segera mengatasi dan menyalurkan bantuan kepada para korban," ujar Agung. (bs)

Jangan Pesimistis Terhadap Anggota DPR Baru

Jurnal MPR (02/10). Terkait adanya pandangan pesimistis dari sejumlah kalangan masyarakat bahwa anggota DPR periode 2009-2014 tidak dapat bekerja maksimal, anggota DPR dari F-PPP Okky Asokawaty mengatakan, justru dengan adanya 70% anggota baru tentunya akan ada harapan dan semangat baru untuk bekerja lebih baik

Okky Asokawaty menyampaikan hal itu usai acara acara pelantikan anggota DPR di Gedung DPR, Jakarta , Kamis (1/10).

"Kenapa sih harus pesimistis dengan anggota DPR yang baru. Justru dengan banyaknya anggota DPR yang baru adalah suatu langkah baik untuk membawa kepada perubahan," kata mantan peragawati dan model kondang yang berjilbab ini.

Bintang iklan, pembawa acara televisi, dan pemain sinetron ini menambahkan, dengan adanya mereka di DPR, tentunya akan menciptakan semangat baru yang belum terkontaminasi oleh apapun. "Kami akan berusaha bekerja keras demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia ," jelas perempuan kelahiran Jakarta 1961 silam

Ketika ditanya ia ingin ditempat komisi mana, Okky menjawab, secara pribadi ingin ditempatkan di Komisi Kesehatan, "Karena menurut saya kesehatan merupakan hal utama," ujarnya. Namun, masalah penempatan, itu semua terserah partai, "Dimanapun saya ditempatkan tidak masalah dan tetap akan berkerja maksimal," tegasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh politisi dari F-PAN, Eko Hendro Purnomo atau lebih dikenal dengan Eko Patrio. Ia berharap, masyarakat jangan terlalu *under estimate* terhadap anggota DPR yang 70% adalah wajah-wajah baru

"Siapa bilang kami dari seniman dan artis tidak bisa bekerja sebagai wakil rakyat. Rekan kami Tantowi Yahya, Dedi Gumelar (Miing) dan Rieke Dyah Pitaloka adalah orang-orang yang berkompeten, mereka cukup menguasai beberapa bidang, termasuk politik dan pemerintahan. Hendaknya beri kami kesempatan, baru kemudian dinilai," tegas Eko yang juga seorang pelawak dan presenter.(nt/sw/mp)

Percha Leampuri Anggota DPD Termuda

Jurnal MPR (02/10). Ratusan pasang mata yang berada di Gedung Nusantara dan jutaan lagi lewat pesawat televisi menyaksikan seorang perempuan muda usia yang duduk di kursi pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada upacara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPR, DPD, MPR Kamis (1/10).

Dia adalah Percha Leanpuri, tertatat sebagai anggota termuda anggota DPD periode 2009-2014. Puteri dari Bupati Oku Timur ini baru berusia 23 tahun, dan masih mengikuti program pasca sarjana di University of Ballarat (Unity College) Malaysia.

Perempuan kelahiran Belitang, 21 Juni 1961, ini dalam statemennya sebagai perempuan politisi adalah mengimbau seluruh anggota DPD dapat turut serta memberikan sumbangan bagi korban bencana gempa di Sumbar. Karena, "DPD memang tiap bulan ada sumbangan untuk bencana di Indonesia," kata Percha.

Menurut Percha, ia sangat bangga dan terharu melihat dorongan dan suport anggota senior lainnya terhadap dirinya. "Mereka menghormati dan menghargai saya untuk menjadi pimpinan termuda sementara," kata lajang yang memiliki hobi menari ini.

Di DPD, mantan model dan peraih *best catwalk* Wajah Sumex 2000 ini berharap bisa berkiprah di Komisi IV membidangi Perimbangan Dana Pusat dan Daerah. "Dulu namanya Panitia AdHoc, sekarang sudah ganti," tutur anak pertama dari empat bersaudara.

Saat ini (kemarin, red), ia masih berkonsentrasi untuk memimpin sidang-sidang yang ada di DPD. "Insya Allah akan masuk di dalam PAH," kata.

Dia berharap, selaku anggota DPD berharap dapat menyumbangkan pemikiran dan sumbangsih bagi Provinsi Sumatra Selatan. "Komitmen saya mudah-mudah dapat menjalankan amanah ini selama 5 tahun ke depan untuk kemajuan Sumatera Selatan.

Ketika ditanya perasaannya saat memimpin Sidang Paripurna DPD, Percha menyatakan, cukup deg-degan, namun ia tetap tawakal dan berusaha bekerja semaksimal mungkin.

Sebelum masuk ke Senayan, penggemar film Monkn ini telah mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan cara mengikuti orientasi yang diselenggarakan. "Saya telah mengikuti orientasi sebanyak dua kali pada bulan lalu dan sebelum pelantikan," terang penggemar lagu *No Air* dari Jordin Spark.(sugeng/ mastur)

Tugas Utama Anggota DPR Kembalikan Citra Positif

Jurnal MPR (02/10). Anggota DPR asal Jawa Barat Ny. Popong Otje Djundjunan menyatakan, tugas berat paling utama bagi anggota DPR periode 2009-2014 adalah mengembalikan citra lembaga. "Ini paling berat, sebab DPR sebelumnya citranya rendah," ujarnya seusai mengikuti acara Pelantikan Anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 di Gedung Nusantara Komplek MPR/DPR Senayan, Kamis (1/10) .

Menurut politisi Partai Golkar ini, sebetulnya mayoritas anggota DPR lalu adalah orang-orang baik, penuh tanggungjawab, tapi ada satu peribahasa nilai setitik rusak susu sebelanga. Hanya sedikit sekali orang yang menjadi "nila" tapi akibatnya sangat fatal. Masyarakat suka menggeneralisir bahwa anggota DPR mayoritas orang tidak baik. "Karena ada **nila** itu, maka tugas kami anggota DPR baru adalah mengembalikan citra lembaga tinggi negara ini," tegasnya.

Caranya, kata Popong, motivasi setiap anggota DPR yang datang ke Senayan adalah untuk memperjuangkan rakyat yang diwakilinya. Menurutnya, bukan hanya pinter dan menguasai permasalahan tapi yang paling penting adalah rasa *love*, cinta kepada rakyat yang diwakilinya. Karena kalau mau melangkah diawali dengan modal rasa cinta, pasti kita akan berbuat yang terbaik.

"Meski mulanya kurang pengalaman, tapi karena modalnya adalah sayang kepada rakyat, maka pasti akan berusaha menjadi *to the best* (yang terbaik) kepada rakyat yang diwakilinya," ujarnya.

Menurut Otje, yang pernah menjadi anggota DPR tiga periode sebelumnya, kalau anggota DPR yang terkena kasus hanya sepuluh orang, itu jumlah yang kecil dibanding jumlah anggota 550 orang. " Seharusnya jangan digeneralisir," tandasnya.

DPR adalah lembaga pengabdian kepada rakyat, jangan cari kekayaan di DPR. "Kalau ingin kaya jadi pengusaha dong, tidak usah jadi wakil rakyat. Menjadi anggota DPR bukan untuk cari duit, tapi berbuat yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Pasti citra Dewan akan meningkat, " tandasnya.

Ia memberikan jalan keluar diantaranya, yang pertama laksanakan tugas sesuai peraturan yang ada, tata tertib laksanakan dengan baik. Misalnya, disiplin sidang mulai jam 09.00 kenapa tidak bisa tepat jam 09.00 dimulai, kenapa harus jam 10.00. Meski kelihatanya sepele, tapi ini menjadi awal tegaknya disiplin yang baik. Ditegaskan Popong, kalau sudah terlambat dan malas nggak usah datang ke gedung DPR, balik saja ke daerah. "Apakah partai yang akan mengganti antarwaktu (recall) itu urusan partai. Saya tegaskan bahwa di sini bukan untuk cari duit, kalau cari duit jadi pengusaha," ungkapnya lagi.

Saat ditanya, pada awalnya orang masuk DPR adalah baik, tetapi saat memproses undang-undang atau anggaran dan proyek lalu tergoda KKN. Popong menyatakan, kalau berangkat jadi anggota DPR dari rasa cinta, tidak mungkin akan memanfaatkan peluang untuk kepentingan sendiri. Dipilih sebagai anggota DPR bukan untuk memanfaatkan peluang untuk berbuat hal-hal yang negatif, tapi untuk bekerja dan bekerja bagi rakyat

Apakah optimisme anggota Dewan sekarang ini 70% wajah baru mampu meningkatkan citra buruk yang ditinggalkan Dewan sebelumnya? Popong menyatakan,

dia bertekad akan bisa mewujudkan hal itu. "Saya yakin kalau semua anggota motivasinya sama memperjuangkan aspirasi rakyat, mau tua atau muda dan dari partai apapun asalnya dan dari daerah manapun, akan berhasil. Tekadnya ini bukan main-main, tapi akan dilaksanakan dengan konsisten.

Anggota Komisi berapa yang diincarnya adalah Komisi II, yang menangani masalah dalam negeri. Pemerintahan termasuk otonomi daerah. Pasalnya, otonomi daerah sekarang ini sangat menentukan, misalnya apakah rakyat akan bisa sejahtera itu tergantung kepada pelaksana-pelaksana otonomi daerah.

Menanggapi sorotan media yang memojokkan, anggota DPR baru bermental lama, politisi asal Bandung ini menyatakan, belum apa-apa sudah dituduh negatif. Harusnya lihat dulu, jangan buru-buru DPR dicap muka baru mental lama, nggak bisa dong. "Beri kesempatan kerja dulu, setelah sebulan atau dua bulan boleh dikomentari, sampaikan kritik, kami persilahkan," ujarnya bijak. (mp)

Rachel Maryam: Siap Jalankan Tugas Di Parlemen

Jurnal MPR (02/10). Siapa yang tidak kenal dengan Rachel Maryam Sayidina atau biasa dipanggil Rachel Maryam. Artis yang satu ini terkenal sebagai model, pemain sinetron dan pemain layar lebar di beberapa film nasional.

Pada Pemilu Legislatif yang lalu, banyak orang tidak percaya bahwa dia masuk sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

Dan baru saja Rachel dilantik menjadi anggota MPR/DPR RI periode 2009 – 2014. Dihadapan puluhan wartawan yang mewawancarainya dia mengatakan siap menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat.

Hal yang terpenting, menurut Rachel, mempersiapkan mental dan berjanji pada diri sendiri bahwa Pengucapan Sumpah/ Janji yang baru saja dilakukan dapat dijalankan sungguh-sungguh. "Saya harus berjuang untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat.

Apalagi, kata Maryam, tudingan orang selama ini menganggap bahwa artis di parlemen kinerjanya kurang baik. "Saya minta teman-teman jangan apriori dulu berilah saya dan teman-teman artis lainnya kesempatan untuk membuktikan diri," kata Rachel bijak.

Kalau sekarang, tentunya belum bisa membuktikan karena baru saja dilantik dan belum menjalankan tugas. Jika nantinya masyarakat beranggapan kinerjanya kurang baik masyarakatlah yang nantinya akan menghukum anggota tersebut dengan tidak memilih lagi pada pemilu mendatang.

"Saya rasa setiap orang berhak menjadi anggota DPR, dan jika artis masuk dalam parlemen itu bukan sesuatu yang buruk, tapi bahkan dapat menjadikan warna tersendiri di DPR," tambah artis cantik ini.

Ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah dilantik. Dengan jujur Rachel mengatakan dia merinding saat Pengucapan Sumpah/Janji Anggota, karena dengan sumpah.janji itu berarti tanggung jawab itu benar-benar ada di pundaknya. Dia membayangkan ini sesuatu yang serius. "Pertanggungjawabannya bukan hanya antara saya dengan rakyat tetapi saya dengan Tuhan," katanya.

Jika ditanya nantinya dia ingin duduk di Komisi mana? Rachel mengatakan, semua tergantung dari fraksi dimana nantinya dia ditempatkan, tapi dia ingin di Komisi X karena punya *background* pengalaman di situ atau di Komisi I yang membidangi luar negeri, karena Rachel merasa cukup mampu berbahasa Inggris.

Sebagai wakil rakyat yang baru saja dilantik bagaimana Rachel menanggapi bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat? Rachel mengatakan, dia sangat prihatin dan ikut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dengan banyaknya korban jiwa.

"Saya mengajak teman-teman untuk memberikan dukungan moral dan kalau bisa dukungan secara materiil," kata Rachel.

Mengingat Negara kita rawan bencana dan bencana itu datang bertubi-tubi terjadi di negara kita, maka dia mengusulkan siapapun yang duduk di Komisi VIII nantinya agar dapat memperjuangkan anggaran untuk bantuan bencana alam lebih ditingkatkan lagi.

Rachel menambahkan, dia siap dengan konsekwensi masuk sebagai anggota legislasi. Untuk itu, dia siap meninggalkan dunia *entertainment* yang membesarkan namanya. Karena tugas menjadi anggota dewan itu bukan tugas yang ringan dan mudah, dimana dia membawa harapan ratusan juta orang. "Jadi saya tidak bisa asal-asalan, ini harus menjadi skala prioritas, " kata pemeran film *Vina Bilang Cinta* ini.

Menurut Rachel, jika dia duduk di Komisi X tetap bisa memberikan kontribusi di dunia seni walaupun tidak harus berakting, tapi kontribusi melalui berbagai Undang-Undang yang dihasilkan DPR RI.

Selain itu, hal penting lainnya adalah Rachel ingin merubah citra DPR yang terpuruk di mata masyarakat, agar dapat lebih baik lagi. (Tuti)

PERIODE 2009-2014 SIAP PERBAIKI KINERJA

Jurnal MPR (02/10). Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Ribka Tjiptaning (F-PDIP) menegaskan akan lebih bekerja optimal di periode keduanya menjabat sebagai wakil rakyat. Hal itu diungkapnya usai pelantikan Anggota DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kamis (1/10).

Mantan Ketua Komisi IX DPR Periode 2004-2009 yang membidangi kesehatan ini menegaskan dari periode pertamanya sebagai Ketua Komisi, telah lahir dua Undang-Undang yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya Undang-Undang Rumah Sakit.

"Harus lebih baik. Bagaimana caranya tidak ada pasien yang ditolak Rumah Sakit. Mengimplementasikan Undang-Undang Rumah sakit dan Kesehatan yang telah kita lahirkan," tegasnya.

Di periode keduanya menjabat sebagai wakil rakyat, Ribka Tjiptaning yang berlatar seorang dokter akan terus memperjuangakn kepentingan rakyat, khususnya berkaitan dengan kesehatan. "Saya tetap duduk di Komisi Kesehatan," ujarnya.

Lebih jauh, Ribka Tjiptaning menilai bahwa ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pelantikan Anggota DPR Periode 2009-2014 sebagai bentuk kurang menghormatinya Presiden kepada DPR.

"Presiden kita kurang menghormati," katanya.

Ketidakhadiran Presiden dalam pelantikan dinilainya sebagai sebuah pelecehan. "Ini sudah membuat hubungan yang tidak baik," ujarnya.

Ingin Menjadi Oposisi

Terkait dengan posisi Fraksi PDIP di DPR yang pada periode sebelumnya menetapkan diri sebagai oposisi, Mantan Ketua Komisi IX 2004-2009 ini menegaskan bahwa ingin terus menjadi oposisi pemerintah.

"Kalau secara pribadi ingin menjadi oposisi," tegasnya.

Namun demikian, posisi sebagai oposisi atau melebur dalam pemerintahan SBY-Boediono, Ribka menjelaskan hal tersebut berpulang kepada keputusan partai. "Keputusan Kongres menjadi oposisi hingga 2010, kalau harus mengubah itu juga harus lewat Kongres," jelasnya.

Kritik Upacara Di Lubang Buaya

Sebelum dilantik, Anggota DPR Periode 2009-2014 terlebih dahulu melakukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ribka Tjiptaning menilai, upacara di Lubang Buaya bukan merupakan wewenang KPU.

"Tahun lalu tidak ada agenda seperti itu. Ini titipan siapa. Ini melegitimasi kembali Orde Baru," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai anak korban rezin Orde Baru menolak sejak awal rencana upacara di Lubang Buaya. "Waktu Megawati dan Gus Dur menjabat sebagai Presiden tidak pernah ada peringatan di Lubang Buaya," jelas Ribka. (bs)

Bingung Cari Ruang Rapat

Jurnal MPR (02/10). Usai sidang paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD, dilanjutkan dengan rapat-rapat internal dan acara lainnya sesuai jadwal. Suasana yang cukup ramai membuat orang hilir mudik dan lalu lalang di Gedung MPR/DPR, Gatot Subroto, Jakarta. Anggota DPR dan DPD yang baru dilantik itu ada yang datang dari daerah di luar Jakarta. Malah, ada yang baru menginjakan kaki di Gedung MPR/DPR.

Tak mengherankan jika anggota DPR baru itu kebingungan mencari ruangan di "belantara" Gedung DPR/MPR. "Ruang Nusantara V di mana?" tanya seorang anggota DPR yang baru diambil sumpah dan janjinya. "Di sana, bapak lewat jalan sini, ikuti jalan ke arah sana, nanti belok kanan dan ketemu ruangan besar. Itu Nusantara V," jawab orang yang ditanya.

Bukan hanya anggota dewan tadi, masih banyak lagi anggota dewan baru yang belum menguasai "medan" ruangan-ruangan di Gedung MPR/DPR. Agar tidak kesasar atau tersesat, memang sebaiknya bertanya. Seperti kata pepatah, "Malu bertanya, sesat di jalan".(Budi Sucahyo)

Poppy Dharsono: Buat Batik Murah

Junal MPR (02/10). Hari ini, Jumat (2/10), masyarakat Indonsia dihimbau untuk mengenakan batik karena batik masuk sebagai warisan dunia yang dikukuhkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai perwakilan dari Jawa Tengah, yang dikenal sentra batik, Popy Dharsono menyambut gembira ajakan tersebut. Dia pun berupaya akan membuat pusat perniagan batik di beberapa kota di Jawa Tengah. "Untuk menumbuhkan industri batik," katanya.

Sebagai pengurus asosiasi desainer, Poppy juga mengajak rekan-rekan sesama desainer untuk membuat produk batik yang dikemas sesuai dengan daya beli masyarakat: batik yang berharga murah, sedang dan mahal. Dengan begitu, industri batik akan terus hidup.(Iman Firdaus)

Harapan dari Bhikkhu

Jurnal MPR (02/10). Bagi Bhiku Dhammasubho Mahathera mengangkat kitab suci Tripitaka di atas kepala ummatnya yang sedang dilantik menjadi pejabat negara atau anggota legeslatif sudah menjadi biasa. Karena itulah, ketika menjalankan tugas itu pada acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, MPR yang beragama Budha, ia tidak grogi meski ribuan pasang mata menatapnya secatra langsung.

"Saya sudah biasa mas mengikuti acara seperti ini," ujar pria asal Kediri, Jawa Timur itu. Dan, pengasuh *Wisma Sangha Theravada Indonesia* itu senang dan bangga karena bersama dengan para pemimpin ummat lainnya, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu, dipercaya menjadi bagian terpenting dari acara pengambilan sumpah para wakil rakyat.

Sebagai seorang Bhiku ia sudah terbiasa berada diantara golongan kaya dan juga golongan miskin. Karenanya ia berharap, anggota legeslatif yang didominasi generasi muda bisa memberi harapan baru. "Mudah-mudahan dengan formasi yang didominasi generasi muda bisa memberikan harapan dan gagasan yang cemerlang," ujarnya.

Selama ini diakui jarak antara wakil rakyat dan rakyat sangat jauh, dan ia berharap kondisi ini tidak terjadi pada anggota DPD/DPR/MPR Periode 2009-2014. "*Mbok* yang di atas ini bisa menunduk ke bawah, sebab yang di bawah sudah sering *mendangak*, melihat dari bawah ke atas dengan berharap," katanya. (Ardi Winangun)

Anggota Baru Diwarnai Kebingungan

Jurnal MPR (02/10). Sejarah baru mengukir gedung Nusantara yang berlokasi di Senayan, Jakarta. Pagi itu, jutaan masyarakat Indonesia menyaksikan jalannya Pengucapan Sumpah/Janji anggota DPR dan DPD RI secara langsung dan lewat layar televisi yang dipimpin Ketua Sementara Marzukie Alie.

Acara pelantikan berlangsung lancar. Sebanyak 560 anggota DPR dan 128 anggota DPD (belum termasuk Papua) telah sumpah jabatan di depan Ketua Mahkamah Agung.

Selesai pelantikan, para anggota DPR dan DPD mulailah keluar ruang sidang, dimana di lobbi depan sudah dihadang puluhan bahkan ratusan wartawan yang ingin mewawancara nara sumber yang diincarnya.

Pemandangan yang sangat bagus untuk diabadikan, dimana tiap-tiap sudut terlihat *tape recorder* yang ditodongkan ke nara sumber, jepretan camera, dan bahkan puluhan camera televisi.

Nara sumber yang diincar para wartawan seperti tokoh PDIP Taufiq Kiemas tengah sibuk melayani setiap pertanyaan wartawan yang datang silih berganti. Namun banyak juga anggota DPR maupun DPD yang tidak dihampiri satu orang pun wartawan.

Tak heran jika para wartawan kebanyakan menyerbu tokoh yang sudah dikenal, seperti para artis atau para kandidat Ketua DPR. Karena wartawan sendiri pun masih bingung siapa-siapa saja anggota baru itu. Mereka belum paham wajah dan nama anggota-anggota baru itu. Jika mereka melakukan wawancara pun, pasti sebelumnya menanyakan nama anggota tersebut dan dari partai mana.

Para anggota yang tidak diserbu wartawan kebanyakan langsung meninggalkan ruang paripurna dan

berjalan mengikuti teman-temannya. Namun ternyata, kebingungan itu bukan hanya melanda wartawan, tapi para anggota baru pun merasakan hal yang sama.

Beberapa anggota tersebut menanyakan kepada panitia, dimana toilet, dimana mushola, dimana ruang untuk jamuan makan. Pertanyaan ini itu kebanyakan ditujukan kepada petugas protokol. Petugas protokol pun kadang harus siap mengantarkan para anggota tersebut jika keterangan yang diberikan masih membuatnya bingung.

Bahkan ketika selesai makan, ketika para anggota ini ingin melanjutkan acara berikutnya, mereka pun kembali bertanya: Dimana Gedung Nusantara II, dimana ruang rapat DPD. Memang banyak anggota yang sama sekali belum mengenal gedung DPR. Apalagi gedung MPR/DPR dan DPD ini sangat luas.

Melihat kebingungan para anggota ini, ada wartawan yang menyeletuk: "Harusnya anggota-anggota itu juga diberikan pengenalan mengenai gedung MPR/DPR dan DPD, kan banyak manfaatnya, " kata salah seorang wartawan yang ada di situ.

"Memang perlu, tapi kayak kurang kerjaan saja, mending mereka segera terjun ngurusi korban gempa di Sumbar," kata teman wartawan lain. (Tuti)

Direktorat Jenderal Pajak Jemput Bola

Jurnal MPR (02/10). Sosialisasi pelayanan pajak menjadi agenda penting Dirjen Pajak kepada warga negara Indonesia baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang sudah memiliki NPWP dan ingin memperbaharuinya. Salah satu kegiatan layanannya, Dirjen Pajak khususnya Kakanwil DJP Jakarta Barat membuka stand didalam area gedung MPR/DPR.

Menurut Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak, Diding Jamaludin pihaknya telah lama juga membuka stand di dalam Gedung MPR/DPR, namanya 'Pojok Pajak'. "Bukan hanya di Gedung MPR/DPR saja, banyak juga dilakukan diberbagai pusat-pusat keramaian dan diberbagai *even*, intinya kami 'jemput bola' dan mengharapkan sosialisasi layanan kami berhasil dan lebih banyak anggota masyarakat yang memiliki NPWP,"ujar Diding.

Diding melanjutkan, khusus untuk layanan di area MPR/DPR, Dirjen Pajak mengharapkan para anggota DPR, DPD yang baru di lantik sebagai wakil rakyat sudah selayaknya mereka membuat NPWP bagi yang belum memiliki dan memperbaharui NPWP jika mereka sudah memilikinya sebagai warga negara yang baik. "Kami mengharapkan mereka memberikan contoh yang baik kepada masyarakat lainnya bahwasanya sebagai warga negara yang baik dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Kami rasa respon mereka sangat baik walaupun agak sedikit lambat yang mendatangi stand kami,"ucap Diding.

Ketika ditanyakan tentang ukuran wajib pajak yang baik, Diding menjelaskan, wajib pajak yang baik itu adalah mereka yang mendaftarkan sebagai wajib pajak kemudian menyetorkan pajaknya sesuai dengan kewajibannya dan kemudian melaporkannya dalam SPT Tahunan.

Dari pantauan Jurnal MPR sampai pukul 13.00 (01/10) baru 20-an pengunjung yang datang menikmati layanan Dirjen Pajak secara mudah. Diding mengharapkan menit demi menit sampai sidang berakhir akan semakin banyak wajib pajak yang datang merespon layanan Dirjen Pajak ini. Selain pelayanan cara ini, Dirjen Pajak juga membuka layanan berupa sarana informasi dan juga *Complain Center* yang disediakan untuk wajib pajak namanya Kring Pajak 500200 (021-500200). Apa pun tentang perpajakan, masyarakat bisa menanyakannya ke nomer telepon ini tentang kewajiban NPWP, tentang tarif, cara mendaftar, cara menyetor dan tentang aturan-aturan lainnya. (Derry Irawan)

Gedung MPR Jadi Ajang Wisata Dadakan

Jurnal MPR (02/10). Kegembiraan semakin menyeruak bagi seluruh anggota DPR, DPD RI yang baru dilantik. Visual kegembiraan tersebut melebihi gegap gempita kegembiraan pada saat gladi bersih beberapa waktu lalu. Pasca upacara pengucapan sumpah anggota DPR, DPD RI yang baru setiap sudut gedung penting MPR/DPR menjadi arena wisata. Pengunjungnya sebagian besar adalah keluarga dan handai tolan para anggota legislatif baru ini.

Macam-macam aksi dadakan dipertontonkan secara gratis mulai dari wisata dadakan mengajak berjalan-jalan seluruh keluarga mengitari gedung yang maha penting di republik ini, makan-makan bersama keluarga, berpeluk-pelukan mengucapkan selamat, berfoto-foto keluarga, ada yang sibuk ber-HP ria lama sekali dengan seseorang diseberang sana sambil berkali-kali mengusap matanya yang mungkin air mata atau hanya kemasukan debu, malah ada yang sangat sentimentil dan haru yang amat sangat.

Seorang istri anggota DPR RI terpilih mengucapkan selamat sampai bercucuran airmata. Di sudut lain seorang anggota DPR RI baru terlihat langsung jatuh bersujud mencium kaki orang tuanya. Sungguh pemandangan yang sangat indah dan haru.

Tapi ada juga sebagian anggota baru itu yang hanya diam saja tak berekspresi, biasa saja. Malah ada selentingan kabar yang diterima Jurnal MPR ada seorang anggota DPR yang tidak melewatkan moment penting itu dengan langsung melamar pujaan hatinya, entah itu kabar burung dan gossip atau betulan, atau malah cuma aksi pengunjung yang memanfaatkan momen bersejarah negara masuk dalam momen bersejarah pribadinya. Yang pasti perhelatan ini merupakan momen penting bagi semua anggota DPR dan DPD.(Derry Irawan)

Ketua DPD Sementara
Mudaffar Syah "Keseleo" Lidah

Jurnal MPR (02/10). Perhelatan upacara Sumpah/Janji Anggota DPD Periode 2009-2014, diwarnai kejadian lucu dan menggelikan. Saat itu, Ketua DPD Sementara (tertua) Mudafar Syah dari Dapil Maluku Utara mempersilahkan rohaniawan maju ke depan mimbar sidang untuk memandu pengucapan sumpah anggota. "Kepada para rohaniawan silahkan maju untuk memandu pengucapan sumpah DPR RI," katanya di hadapan 132 calon anggota DPD, di Gedung Nusantara, Kamis, (1/10).

Seketika Anggota MPR/DPR/DPD yang berada di dalam ruangan sidang terdiam sejenak, terlihat sejumlah anggota tertawa kecil mendengar ucapan dari pimpinan. Menyadari kekeliruannya, akhirnya Ketua DPD Sementara yang telah berumur 74 tahun ini meralat ucapannya. "Untuk rohaniawan silahkan memandu pengucapan sumpah DPD RI," Sejumlah anggota terlihat tertawa dan juga ada yang tersenyum kecil melihatnya.

Sebelumnya, Mudafarsyah pernah menjadi anggota DPR Periode 2004-2009 bahkan keterlibatan dirinya selaku legislator

sudah berlangsung sejak 25 tahun lalu. Hal inilah yang menyebabkan dirinya keseleo mengucapkan kalimat DPD. "Saya kelamaan di DPR, biasalah manusiawi," Sultan Ternate yang pernah menjadi anggota DPR Komisi X bidang pendidikan, usai acara pelantikan anggota DPD RI.

Pengambilan sumpah dipandu Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa. Inilah cuplikan isi sumpah itu: "Saya berjanji memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya resmilah anggota DPD menjadi wakil konsituennya guna memperjuangkan aspirasi daerah mereka masing-masing.(sugeng)

Marzuki Alie
Dihinggapi Penyakit Grogi

Jurnal MPR (02/10). Hari Kamis, 1 Oktober 2009, adalah hari yang dinanti-nanti para calon Anggota MPR/DPR/DPD RI. Tak heran, karena tanggal tersebut hari pelantikan atau tepatnya Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI.

Acara pagi itu dimulai terlebih dulu dengan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR RI. Sebelum acara dimulai, Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan terlebih dulu Keputusan KPU tentang siapa yang ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR sementara untuk memimpin jalannya sidang.

Marzuki Alie dari Partai Demokrat terpilih menjadi Ketua DPR sementara wakilnya terpilih Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar. Pemilihan ini berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak Pemilu lalu, dimana Partai Demokrat memperoleh suara 148 kursi dan Partai Golkar di urutan ke dua sebanyak 106 kursi.

Setelah keputusan dari KPK ini dibacakan, maka Marzuki Alie dan Priyo Budi Santoso dipersilahkan untuk membuka Rapat Paripurna. Marzuki dan Priyo yang sudah duduk di kursi urutan pertama pun melangkah menuju kursi Pimpinan. Langkahnya mantap diiringi teman sejawatnya yang ada disebelahnya.

Setelah duduk, dia pun membuka jalannya sidang. Biasanya setiap pembukaan sidang pertama kali yang diucapkan Pimpinan adalah kata "Assallamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh," dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Namun kata-kata salam pembuka itu belum diucapkan, Marzuki langsung memulai jalannya sidang. Alhasil, para calon anggota berpandangan satu sama lain melihat ada sesuatu yang tidak lazim.

Marzuki pun akhirnya tersadar bahwa ada hal penting yang lupa dia ucapkan. Akhirnya dia pun mengulang kembali dengan tak lupa mengucapkan salam pembuka "Assallamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh".

Para anggota yang hadir di ruang sidang itu pun tersenyum-senyum melihat pimpinan sementara sidang yang meralat kesalahannya. Tapi semua maklum, ini baru pertama kalinya Marzuki memimpin sidang terhormat ini. Apalagi dihadiri 560 calon Anggota DPR dan 128 calon Anggota DPD. Belum lagi tamu-tamu undangan pentingnya lainnya, selain juga harus berhadapan dengan lampu camera yang tak terhitung banyaknya.

Jadi, wajar saja kalau Pimpinan DPR sementara dihinggapi "Penyakit grogi", penyakit ini mungkin saja bisa menghinggapi anggota lainnya.

Hanya satu kalimat yang bisa kita ucapkan "Ah itu sih wajar saja, jalan terus Pak Marzuki, tugas berat telah menantimu.(Tuti)